

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup atau tinggal bersama-sama mendiami wilayah pesisir dengan melakukan aktivitas sosial ekonomi, serta membentuk dan memiliki kebudayaan khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir, artinya secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan (Tamboto & Manongko, 2019).

Sumber daya laut Indonesia sangat beragam jenis dan potensinya. Sumber daya potensial tersebut bersifat terbarukan, seperti sumber daya perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, mangrove, energi gelombang, pasang surut air laut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), sedangkan sumber daya tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi dan berbagai jenis energi alam mineral, selain itu terdapat berbagai jenis industri jasa lingkungan laut yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelautan, seperti wisata bahari, perkapalan, jasa transportasi, dan yang lainnya (Irawan & Tanzil, 2020). Karakteristik sosial ekonomi atau kebiasaan masyarakat pesisir ialah sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, penambangan pasir, transportasi laut dan lain-lain, yang

sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan (Najmi & et al., 2020; Muawanah & et al., 2020).

Wilayah Indonesia, sebagian besarnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi laut yang cukup besar. Masyarakat pesisir yang mengandalkan potensi laut ini untuk mata pencaharian, seharusnya dapat memperbaiki kehidupan mereka. Kenyataannya, kehidupan nelayan selalu dilanda kemiskinan, jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, nelayan selalu dianggap sebagai masyarakat yang terpinggirkan dan tertinggal dari segi ekonomi, sosial (terutama dalam hal akses pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan budaya. Dibalik marginalisasi, masyarakat pesisir tidak memiliki banyak cara untuk mengatasi masalah yang ada. Akibat minimnya kesempatan berusaha, minimnya akses informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup, serta minimnya kemampuan memahami konsep ekonomi dan rendahnya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia), itu menandakan bahwa kemiskinan pada masyarakat pesisir bersifat multidimensi.

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara lautan dan daratan, wilayah daratan berupa daerah yang tergenang air maupun tidak yang masih dipengaruhi oleh percikan air laut atau pasang surut air laut, angin laut dan intrusi garam. Sementara itu wilayah lautan dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan berupa sedimentasi serta aliran air tawar ke laut dan daerah lautan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daratan. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut

secara intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pesat dan memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Kenyataannya, wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama pertumbuhan ekonomi nasional, juga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pendidikan masyarakat pesisir, sebagian besar masih berada pada tingkat yang rendah. Kondisi lingkungan di permukiman masyarakat pesisir khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang relatif rendah kesejahteraannya, dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir.

Kondisi yang tergantung musim sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan, terkadang karena musim yang tidak menentu, nelayan tidak melaut selama beberapa minggu. Akibat SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum handal dan peralatan yang digunakan nelayan masih bersifat tradisional mempengaruhi metode penangkapan, terbatasnya pemahaman teknologi membuat kualitas dan kuantitas hasil tangkapan tidak meningkat, akibatnya penangkapan ikan sedikit (pasti akan berkurang), serta mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Terlihat bahwa masyarakat pesisir yang miskin membutuhkan pemberdayaan tersebut. Mereka sangat bergantung pada pemanfaatan hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat miskin hidup dengan menangkap ikan

maupun pekerjaan lainnya yang ada di perairan setempat. Hasil tangkapan tersebut, sebagian besar dari mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja seperti sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan anak sekolah, dan aktualisasi diri belum menjadi sebuah prioritas. Mempertimbangkan keadaan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pesisir melalui pemberdayaan.

Terdapat beberapa program bantuan kemiskinan yang sebenarnya telah diberikan kepada masyarakat pesisir, salah satunya ialah CCDP-IFAD (*Coastal Community Development Project - International Fund for Agricultural Development*) atau program pembangunan masyarakat pesisir yang merupakan proyek kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD. Berdasarkan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan IFAD pada tanggal 23 Oktober 2012. Rencana tersebut merupakan respon langsung terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan, Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan rencana IFAD. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No. 1 mengatur kewajiban pemerintah untuk memberdayakan masyarakat nelayan. Keputusan

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya Pasal 63 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

*(1) "Pemerintah (Pusat) dan daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya."*

*(2) "Pemerintah (Pusat) dan pemerintah daerah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, penyediaan teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya."*

Diterapkannya pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir, artinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup, ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang ada agar tercipta sebuah kemandirian yang permanen di kehidupan mereka. Keterampilan dan bekal ilmu merupakan bentuk pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dan mesti dikembangkan agar dapat membentuk prilaku mereka menuju sadar, artinya mampu merubah pola pikir mereka akibat dari sulitnya menerima hal-hal baru (Asmirelda & et al., 2020). Masyarakat di kawasan pesisir adalah pihak yang sangat berperan untuk pengelolaan dan juga pengembangan kawasan bahari tersebut, lantaran mereka sendirilah yang memanfaatkan potensi bahari (Hajar & dkk., 2018). Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ialah dengan mencermati secara serius aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan dan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Ar-Ra'd [13]:11 berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ  
مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*Memiliki arti sebagai berikut "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."*

Mayoritas penduduk Kalurahan Srigading hidup dengan bercocok tanam, yakni berprofesi sebagai petani (kurang lebih sebanyak 80%). Mereka memperoleh pendapatan dari menanam padi, brambang (bawang merah), dan cabai merah. Area persawahan yang luasnya ratusan hektar, di setiap musimnya ditanami padi sekali dan brambang juga cabai merah dua kali. Kalurahan Srigading memiliki luas wilayah 814,42 hektar (ha) dengan jumlah penduduk 9.524 orang yang terdiri dari 3.510 kepala keluarga. Posisi wilayah Kalurahan Srigading cukup strategis, akibat terlewati jalan besar dari Kota Bantul ke selatan menuju Pantai Samas. Dulu jalan tersebut menjadi jalur wisata pantai yang sangat ramai, oleh karena itu akses menuju wilayah pengembangan ekonomi bahari di Kalurahan Srigading cukup mudah. Jenis pekerjaan atau mata pencaharian Kalurahan Srigading dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1. Total Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	MENGURUS RUMAH TANGGA	390
2	PELAJAR/MAHASISWA	1.068
3	PENSIUNAN	173

4	BELUM BEKERJA	274
5	ASN	253
6	TNI	21
7	POLRI	34
8	PEJABAT NEGARA	0
9	BURUH /TUKANG BERKEAHLIAN KHUSUS	854
10	SEKTOR PERTANIAN /PETERNAKAN /PERIKANAN	2.087
11	KARYAWAN BUMN/BUMD	12
12	KARYAWAN SWASTA	901
13	WIRASWASATA	1.540
14	TENAGA MEDIS	27
15	PEKERJAAN LAINNYA	129
16	LAIN-LAIN	1.761
	<b>Total</b>	<b>9.524</b>

Sumber: Data Monografi Kalurahan Srigading, 2020.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat potensi SDA (Sumber Daya Alam) di pesisir Pantai Samas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memiliki potensi alam yang luar biasa, seperti hasil laut, hutan mangrove, dan lahan pasir menjadikan Kalurahan Srigading bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi di Kabupaten Bantul bila dikelola dengan baik dan didukung dengan pendanaan, serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal. Kalurahan Srigading ialah salah satu dari 34 Kalurahan di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang berbatasan dengan laut. Terdapat tiga padukuhan di Kalurahan Srigading yang memiliki garis pantai, yakni Padukuhan/Dusun Segosanden, Tegalrejo, dan Ngepet. Sepanjang Pantai Samas sudah ada kegiatan pengembangan mangrove, konservasi penyu, garam rakyat, pemanfaatan lahan pasir, dan

tempat pendaratan ikan. Potensi bahari di Kalurahan Srigading masih dikelola oleh masyarakat secara tradisional, seperti tanaman mangrove ditanam sendiri oleh masyarakat di sekitar Pantai Samas yang berada di sepanjang Padukuhan Tegalrejo – Segosanden, begitu pula dalam melakukan konservasi atau penangkaran penyu, membuat garam, menanam bawang merah atau brambang dan cabai di lahan pasir, serta menangkap ikan di laut menggunakan alat dan kemampuan seadanya. Potensi SDA (Sumber Daya Alam) atau laut adalah ikan bawal, udang karang, udang vaname dan layur (tangkapan musiman). Sebagian kecil masyarakat sebagai nelayan (gelombang laut besar dan hasil nelayan musiman), nelayan melaut menggunakan perahu motor tempel (pagi hari – siang hari).

Pemprov DIY melalui Lembaga Paniradya Keistimewaan tahun 2020 telah mengalokasikan dana sekitar Rp 50,7 miliar untuk pengembangan Desa Maritim yang ada di sepanjang 103 kilometer garis pantai wilayah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) itu merupakan program BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Danais. Setiap Desa yang berbatasan dengan laut memiliki peluang mendapatkan bantuan danais yang besarnya antara Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Harapan dari Desa terhadap dinas kelautan ialah dapat memberikan pembinaan dan melalui danais diharapkan dapat mengembangkan wisata bahari.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti berusaha untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai potret kondisi pemberdayaan

masyarakat Pesisir Pantai Samas, faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Pesisir Pantai Samas, dan strategi pemberdayaan masyarakat Pesisir Pantai Samas dalam memperbaiki kehidupan mereka dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Samas di Kabupaten Bantul.”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalah atau permasalahan pokok yang akan diteliti:

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Pesisir Pantai Samas.
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pesisir Pantai Samas.
3. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pesisir Pantai Samas dalam memperbaiki kehidupan mereka.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Pesisir Pantai Samas.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pesisir Pantai Samas.
3. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir di Pantai Samas dalam memperbaiki kehidupan mereka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi.
3. Bahan rekomendasi atau media informasi bagi instansi terkait, seperti institusi pendidikan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan atau mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya pada masyarakat pesisir. Sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan (sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dan para *stakeholder*).
4. Bagi masyarakat pesisir Pantai, pentingnya pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir agar dapat memperbaiki kehidupan mereka, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih optimal.